

Peran Subsidi Listrik bagi Pelanggan Daya 450 VA dan 900 VA dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Mekarmanik

Risfa Siti Roiatul Muna¹, Faisal Mujahid², Keysa Nazwa Ganena³

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: risfamunaaaa@gmail.com¹, faisalmujahid01@gmail.com², keysagane@gmail.com³

Keywords:

*Electricity Subsidy 1
Purchasing Power 2
digital service 3
Low-income
Communities 4
Fiscal Policy 5*

Abstract: *This study aims to analyze the role of electricity subsidies in maintaining the purchasing power of low-income communities in Mekarmanik Village, within the service area of PLN ULP Ujung Berung, Bandung Regency. The study employed a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation. The findings show that electricity subsidies help reduce household expenses, enabling communities to meet other essential needs. In addition, digital services through the PLN Mobile application are considered to facilitate subsidy services. However, several challenges remain, including limited technological understanding among communities and issues related to the validity of subsidy recipient data. Therefore, improvements in socialization and data verification are needed to ensure that electricity subsidies are implemented more effectively and accurately targeted.*

Kata Kunci:

*Subsidi Listrik 1
Daya Beli 2
Pelayanan Digital 3
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah 4
Kebijaka Fiskal 5*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis peran subsidi listrik dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Mekarmanik, wilayah pelayanan PLN ULP Ujung Berung Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile dinilai mempermudah pelayanan subsidi listrik. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman teknologi masyarakat serta masalah validitas data penerima subsidi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan perbaikan pendataan agar pelaksanaan subsidi listrik lebih efektif dan tepat sasaran.*

Pendahuluan

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik terus mengalami peningkatan (Sapthu, 2023). Pemanfaatan listrik tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang sektor pendidikan, komunikasi, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha masyarakat (Ridho, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan energi listrik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, keterjangkauan akses listrik menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, meningkatnya biaya kebutuhan hidup menyebabkan beban ekonomi rumah tangga masyarakat semakin besar. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, serta kebutuhan energi rumah tangga menjadi tantangan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan terbatas. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran listrik menjadi salah satu komponen pengeluaran rutin yang cukup memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tingginya biaya kebutuhan dasar dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lainnya sehingga kondisi daya beli masyarakat menjadi semakin rentan (Rizani et al., 2023).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan subsidi listrik kepada kelompok masyarakat tertentu. Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Nainggolan et al., 2024). Kebijakan subsidi listrik bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh akses energi listrik dengan tarif yang lebih terjangkau sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, subsidi listrik juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perspektif teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Richard Musgrave, kebijakan fiskal pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi,

distribusi, dan stabilisasi (Putra et al., 2025). Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan kebutuhan publik oleh pemerintah, termasuk penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat. Fungsi distribusi dilakukan melalui pemberian subsidi kepada kelompok masyarakat tertentu guna menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Berdasarkan teori tersebut, subsidi listrik dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan subsidi listrik di Indonesia saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penyaluran subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga melalui pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, pendanaan subsidi listrik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta menjamin keterjangkauan akses energi listrik (Nainggolan et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa subsidi listrik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian (Nainggolan, 2024) berjudul *"Kebijakan Subsidi Listrik dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat"* menjelaskan bahwa subsidi listrik membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, penelitian (Ningsih & Syalikha, 2024) mengenai *"Peran Akses Energi dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)"* menunjukkan bahwa akses listrik yang terjangkau berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian (Ilmu et al., 2022) berjudul *"Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman"* menunjukkan bahwa implementasi subsidi listrik masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kelistrikan saat ini telah didukung melalui layanan digital seperti aplikasi PLN Mobile yang digunakan untuk pengajuan layanan dan akses informasi terkait kelistrikan. Kehadiran layanan digital tersebut dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Namun demikian, pada masyarakat pedesaan masih ditemukan keterbatasan dalam memahami penggunaan layanan digital serta informasi terkait subsidi listrik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pengajuan maupun informasi mengenai subsidi listrik yang diberikan pemerintah.

Penelitian ini dilakukan di Mekarmanik yang merupakan salah satu wilayah dalam cakupan pelayanan PLN ULP Ujung Berung, Bandung Timur, Kabupaten Bandung. Mekarmanik dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan listrik bersubsidi daya 450 VA dan 900 VA. Selain itu, kondisi masyarakat di wilayah tersebut dinilai relevan untuk mengkaji bagaimana peran subsidi listrik dalam membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran subsidi listrik bagi pelanggan daya 450 VA dan 900 VA dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Mekarmanik.

Tinjauan Literatur

Subsidi Listrik

Subsidi listrik merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar kebutuhan listrik dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini umumnya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi (Algamar & Magriasti, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas rumah tangga bergantung pada energi listrik, mulai dari penerangan, kegiatan belajar, hingga aktivitas ekonomi kecil masyarakat. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), subsidi listrik diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah

berupaya membantu masyarakat yang secara ekonomi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Kebijakan Fiskal Dan Teori Keuangan Publik Musgrave

Subsidi listrik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi (Huda et al., 2024). Dalam hal ini, subsidi listrik menjadi salah satu bentuk pengeluaran negara yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. (Justifikasi, n.d.).

Teori keuangan publik yang dikemukakan oleh (Musgrave, 1998) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan publik yang penting bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, listrik dapat dipahami sebagai kebutuhan dasar yang harus tetap dapat diakses oleh masyarakat secara merata. Selanjutnya, fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Melalui subsidi listrik, pemerintah berusaha membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terlalu terbebani oleh biaya listrik. Kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah. Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kondisi ekonomi masyarakat agar tetap stabil (Jaelani, 2024). Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, subsidi listrik dapat membantu menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun secara drastis (Ridwan et al., 2024).

Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Daya beli masyarakat merupakan kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat daya beli biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang, tingkat inflasi, serta besarnya pengeluaran rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga

kebutuhan pokok dapat sangat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga (Wati et al., 2025).

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling rentan mengalami penurunan daya beli ketika terjadi kenaikan biaya kebutuhan hidup, termasuk biaya listrik dan energi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Nuzaimah, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, subsidi listrik memiliki hubungan yang cukup erat dengan daya beli masyarakat. Dengan adanya subsidi, pengeluaran untuk biaya listrik dapat ditekan sehingga masyarakat masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila biaya listrik meningkat tanpa adanya subsidi, maka pengeluaran rumah tangga juga akan meningkat dan dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Menurut World Bank (2023), subsidi energi yang diberikan secara tepat sasaran dapat membantu menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, ketepatan sasaran penerima subsidi menjadi hal yang sangat penting agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan (Report & Subsidy, n.d.).

Dalam pandangan penulis, subsidi listrik memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga agar tetap stabil di tengah meningkatnya biaya hidup saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran subsidi listrik dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dilakukan di Mekarmanik yang merupakan wilayah pelayanan PLN ULP Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih terdapatnya masyarakat penerima subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA

serta adanya keterbatasan masyarakat dalam memahami layanan digital terkait subsidi listrik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat penerima subsidi listrik dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai manfaat subsidi listrik serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan subsidi listrik. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Kondisi Infrastruktur Listrik dan Peran Subsidi Listrik bagi Masyarakat Mekarmanik

Desa Mekarmanik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dan termasuk dalam wilayah pelayanan PLN ULP Ujung Berung. Berdasarkan data profil desa, Mekarmanik merupakan wilayah perdesaan dengan sebagian kondisi geografis berupa area perbukitan sehingga akses terhadap pelayanan infrastruktur, termasuk energi listrik, menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari (Dina, 2023). Ketersediaan listrik dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, jaringan listrik di wilayah Mekarmanik secara umum telah menjangkau sebagian besar rumah tangga masyarakat. Berdasarkan data profil desa dan hasil wawancara lapangan, jumlah penduduk Desa Mekarmanik diperkirakan mencapai sekitar 4.000 jiwa dengan lebih dari 1.200 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 430 kepala keluarga tercatat menggunakan listrik bersubsidi daya 450 VA dan 900 VA karena tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagian besar masyarakat penerima subsidi bekerja pada sektor informal seperti buruh harian, petani, pedagang kecil, dan pekerja lepas dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan biaya listrik rumah tangga masih menjadi salah satu pengeluaran rutin yang cukup memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 80% masyarakat penerima subsidi mengaku

mengalami kesulitan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga sebelum menerima subsidi listrik karena pendapatan yang terbatas harus dibagi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Adanya subsidi listrik dinilai sangat membantu masyarakat dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, subsidi listrik membantu masyarakat tetap memperoleh akses energi listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Listrik digunakan masyarakat untuk kebutuhan penerangan rumah, penggunaan alat elektronik rumah tangga, kegiatan belajar anak, hingga kebutuhan usaha kecil masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsidi listrik memiliki peran penting dalam membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Mekarmanik.

Selain membantu masyarakat dalam aspek ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi jaringan listrik di beberapa wilayah Mekarmanik masih mengalami kendala berupa tegangan listrik yang kurang stabil terutama pada malam hari ketika penggunaan listrik masyarakat meningkat. Masyarakat yang berada pada wilayah pelosok dan perbukitan juga mengaku masih mengalami gangguan listrik ketika terjadi cuaca buruk seperti hujan deras dan angin kencang. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa penanganan gangguan listrik oleh pihak PLN saat ini relatif lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Pelayanan PLN ULP Ujung Berung dalam Penyaluran Subsidi Listrik

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan subsidi listrik di wilayah Mekarmanik saat ini dilakukan secara digital melalui aplikasi PLN Mobile. Pihak PLN ULP Ujung Berung menyatakan bahwa proses pengajuan subsidi listrik dilakukan menggunakan data KTP masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh proses pengajuan dan pelayanan subsidi dilakukan secara daring melalui aplikasi PLN Mobile sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pengajuan manual secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 65% masyarakat penerima subsidi mengetahui proses pengajuan layanan subsidi melalui aplikasi PLN Mobile. Masyarakat menilai bahwa pelayanan digital tersebut cukup membantu karena proses pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, sebagian masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena keterbatasan pemahaman teknologi, khususnya pada masyarakat usia lanjut dan masyarakat pedesaan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak PLN lebih memfokuskan pelayanan pengajuan subsidi melalui aplikasi digital sehingga masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi cenderung mengalami hambatan dalam proses pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat meminta bantuan keluarga, perangkat desa, maupun datang langsung ke kantor PLN untuk memperoleh informasi terkait layanan subsidi listrik.

Akses Informasi dan Pemahaman Masyarakat Mekarmanik terhadap Subsidi Listrik

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat Mekarmanik terkait subsidi listrik masih belum merata. Sebagian masyarakat belum memahami secara jelas mengenai kategori penerima subsidi listrik, prosedur pengajuan subsidi, maupun mekanisme pengaduan terkait subsidi listrik. Masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa subsidi listrik diberikan kepada masyarakat kurang mampu tanpa memahami proses pendataan melalui DTKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat penerima subsidi memperoleh informasi terkait subsidi listrik melalui perangkat desa, tetangga, maupun keluarga. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi digital dan penggunaan aplikasi layanan kelistrikan. Masyarakat yang tergolong kurang memahami teknologi atau gaptek cenderung memperoleh informasi melalui kantor desa yang kemudian membantu menyampaikan informasi lanjutan terkait mekanisme subsidi listrik maupun proses pelayanan yang harus dilakukan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa beberapa perangkat desa turut membantu masyarakat dalam memberikan arahan terkait penggunaan aplikasi PLN Mobile, proses pengajuan layanan, serta penyampaian informasi apabila terdapat perubahan kebijakan subsidi listrik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa masyarakat yang mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung terkait mekanisme subsidi listrik maupun penggunaan layanan digital kelistrikan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Bantuan subsidi listrik membantu masyarakat mengurangi pengeluaran rutin rumah tangga sehingga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsidi listrik menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perspektif teori keuangan publik (Musgrave, 1998), kebijakan subsidi listrik mencerminkan fungsi distribusi pemerintah melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu guna menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Selain itu, subsidi listrik juga menunjukkan fungsi stabilisasi karena membantu masyarakat mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan pengeluaran masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Fatimah dan Rudi Hartono (2022) yang menjelaskan bahwa subsidi listrik membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Dewi Anggraini (2023) yang menyatakan bahwa akses energi listrik yang terjangkau memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan subsidi listrik saat ini telah mengalami transformasi digital melalui penggunaan aplikasi PLN Mobile. Digitalisasi pelayanan tersebut memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan

pengajuan subsidi listrik. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan berbasis digital masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman teknologi pada sebagian masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat usia lanjut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik belum sepenuhnya dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai perantara informasi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Andika Pratama dan Jumiati (2021) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan subsidi listrik masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa validitas data penerima subsidi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan subsidi listrik. Masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan subsidi namun belum terdaftar dalam DTKS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan subsidi listrik masih memerlukan peningkatan dalam aspek pendataan dan pengawasan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Desa Mekarmanik sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan kondisi pelaksanaan subsidi listrik pada wilayah pelayanan PLN ULP Ujung Berung secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan subsidi listrik di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, subsidi listrik memiliki peran penting dalam membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Mekarmanik. Subsidi listrik membantu masyarakat mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti pangan,

pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, subsidi listrik juga mendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan energi listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pelaksanaan subsidi listrik saat ini telah didukung melalui layanan digital berbasis aplikasi PLN Mobile yang dinilai mampu mempermudah pelayanan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman teknologi pada sebagian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan usia lanjut. Selain itu, validitas data penerima subsidi juga masih menjadi tantangan karena masih terdapat masyarakat yang layak menerima subsidi tetapi belum terdaftar dalam DTKS. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan pelayanan digital, serta perbaikan pendataan penerima subsidi agar pelaksanaan subsidi listrik dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Daftar Pustaka

- Algamar, R., & Magriasti, L. (2024). Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di Kecamatan Lubuk Begalung. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 3(4), 386–394.
- Dina, D. D. (2023). PENGALIAN POTENSI DESA MENUJU DESA WISATA AGRO BAWANG MERAH DI DESA MEKARMANIK KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Babakti*, 3(1).
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Ilmu, D., Negara, A., & Padang, U. N. (2022). *PERAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PROSES PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN (SLTS) DI NAGARI KASANG KECAMATAN DOI : 1*, 263–269.
- Jaelani, A. (2024). *Keuangan publik Islam: Refleksi APBN dan politik anggaran di Indonesia*.
- Justifikasi, A. K. (n.d.). *Reformasi Subsidi Energi (Listrik dan Elpiji 3 Kg)*. 1–8.
- Musgrave, R. A. (1998). *1 The Role of the State in the Fiscal Theory*. 35–36.
- Nainggolan, L. N. (2024). *TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI MASYARAKAT*

- PRASEJAHTERA DALAM MENGHADAPI FENOMENA SUBSIDI. 10(1), 114–130.*
- Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Gas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 10(1), 114–130.*
- Ningsih, V. K., & Syalikha, S. (2024). *Implementasi Subsidi Listrik Pencapaian SDGs Tujuan 7 untuk Mendorong. 1(4), 1–12.*
- Nuzaimah, N. (2025). *ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH, TINGKAT PENDAPATAN NASIONAL DAN HARGA ENERGI LISTRIK RUMAH TANGGA TERHADAP KEMISKINAN ENERGI DI INDONESIA.* Universitas Malikussaleh.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(6), 408–416.*
- Report, T., & Subsidy, E. (n.d.). *APPROACHES AND INSIGHTS.*
- Ridho, A. (2025). *PENGARUH SEKTOR INDUSTRI, SEKTOR RUMAH TANGGA, SEKTOR KOMERSIAL DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI ENERGI LISTRIK DI INDONESIA.*
- Ridwan, M., Khasanah, N., Fauziah, R. S., & Kholid, A. R. (2024). Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Negara Indonesia. *Journal Central Publisher, 2(8), 2372–2379.*
- Rizani¹, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek inflasi terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research Vol, 1(2).*
- Sapthu, A. (2023). Listrik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika, 17(2), 199–207.*
- Wati, E. J., Sari, M. I., & Hidayattullah, Y. (2025). Dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia: Tinjauan literatur. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11).*